

Warga Mengadu kepada Ombudsman

Tangerang, Kompas - Tim Pengendalian dan Pelestarian Situ Antap terus memperjuangkan pengembalian fungsi Situ Kayu Antap, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Karena merasa aduan mereka belum mendapatkan respons dari Kejaksaan Tinggi Banten, tim yang mewakili warga itu pun mengadu kepada Ombudsman Republik Indonesia.

"Laporan awal sudah kami serahkan sejak 29 Desember (2009) kepada bagian penerima pengaduan, Oki A. Kami diminta membuat laporan secara resmi dan diajukan kepada pimpinan Ombudsman," kata Sekretaris Tim Pengendalian dan Pelestarian Situ Antap, Nukman, Kamis (7/1).

Laporan awal itu, kata Nukman, langsung dibawa tim ke Kantor Ombudsman di Jalan Juanda No 36, Jakarta Pusat. "Saat ini tim sudah selesai menyusun laporan resmi seperti yang diminta pihak Ombudsman. Ada delapan lembar laporan yang sudah kami persiapkan. Kami juga akan melengkapi dokumen yang kami miliki mengenai keberadaan situ ini," ujar Nukman.

Dalam laporan pengaduannya, lanjut Nukman, salah satu yang menjadi sorotan dari tim adalah dugaan kesalahan administrasi atas lahan negara yang sudah dimiliki secara perseorangan itu. Hal itu, di antaranya, dugaan kesalahan administrasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang yang mengeluarkan sertifikat atas lahan negara itu.

Hal lain adalah dugaan kebohongan yang dilakukan Bupati Tangerang yang telah mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) pemagaran lahan Situ Antap dengan alasan untuk mengembalikan fungsi situ. Namun, tiga bulan kemudian, kata Nukman, Situ Antap mulai diuruk.

Namun, saat ini Pemkot Tangsel tak akan mengeluarkan IMB di atas lahan Situ Antap meskipun lahan tangkapan dan resapan air seluas 16.300 meter persegi itu kini telah rata dengan tanah urukan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tangerang Selatan tetap tidak akan memproses permohonan mendirikan bangunan di atas lahan tersebut (Kompas, 7/1).

Tindak lanjut

Dari Serang dilaporkan, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten Dicky R Rahardjo mengatakan, pihaknya terus menindaklanjuti surat dari masyarakat dan juga Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait persoalan situ tersebut. "Kami sedang mengklarifikasi sejak dari proses awal. Target secepatnya," papar Dicky.

"Jelas ini membutuhkan waktu, terutama dalam mengkaji dan meneliti arsip dan peta-peta," ujar Dicky.

Dicky mengatakan, pihaknya juga sedang mengumpulkan keterangan dan klarifikasi dari BPN, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. (PIN/CAS)